

## Putra Aung San Suu Kyi Khawatirkan Kondisi Ibunya

**BANGKOK(IM)** - Putra bungsu pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung Sang Suu Kyi, Kim Aris mengkhawatirkan kesehatan ibunya di penjara. Aris yang biasanya menghindari berbicara dengan media, mengungkapkan keprihatinan tentang krisis politik yang penuh kekerasan di Myanmar.

“Dia tidak punya akses ke dokter pribadinya. Sejauh yang saya tahu, dia tidak diizinkan menerima pengunjung mana pun. Dia bahkan tidak diperbolehkan bergaul dengan tahanan lain, yang berarti dia pada dasarnya berada di sel isolasi,” ujar Aris.

Suu Kyi ditangkap pada 2021 ketika tentara merebut kekuasaan dari pemerintahannya yang dipilih secara demokratis. Sejak saat itu, ia telah diadili dan dihukum dengan puluhan dakwaan pelanggaran. Menurut para pendukungnya, dakwaan itu dibuat untuk menjauhkan Suu Kyi dari politik. Suu Kyi hadapi total hukuman penjara 27 tahun.

Aris mengatakan, dia telah berusaha untuk tidak menjadi pusat perhatian selama beberapa dekade. Aris juga berusaha menghindari aktivisme politik. Dia ingin tetap tenang dan melanjutkan kehidupan bersama keluarganya.

“Saya selalu berusaha menghindari berbicara dengan media dan (telah) menghindari media sosial sepanjang hidup saya. Namun situasi di Burma saat ini benar-benar menyedihkan,” kata Aris, mengacu pada nama lama Myanmar.

Aris mengatakan, dia sama sekali tidak dibolehkan berkomunikasi dengan Suu Kyi selama lebih dari dua setengah tahun. Oleh karena itu, kini saatnya Aris angkat bicara.

“Jadi sekarang saya melakukan semua yang saya bisa untuk mencoba membantu situasi ini dan membawa kesadaran akan situasi ini ke dunia yang lebih luas,” kata Aris.

Aris semakin aktif di media sosial. Aris mengatakan, dia merencanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pendanaan untuk tujuan kemanusiaan. Aris mengatakan, dia mendengar ibunya sakit parah dengan mengalami masalah gusi, dan tidak bisa makan.

“Dia menderita pusing dan muntah-muntah dan tidak bisa berjalan,” ujar Aris.

Aris mengetahui kondisi ibunya dari media independen Myanmar dan media sosial. Aris telah mencoba menghubungi pemerintah militer Myanmar, termasuk kedutaan besarnya di London, tetapi tidak mendapat tanggapan.

“Mereka bahkan tidak mau membukakan pintu untuk saya,” ujar Aris.

Ini bukan pertama kalinya Suu Kyi menghadapi hukuman penjara. Dia menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan rumah di bawah pemerintahan militer sebelumnya pada 1989, setahun setelah ikut mendirikan partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Namun ketika itu sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah keluarganya di Yangon, dan dia tidak sepenuhnya terisolasi.

“Saat itu, dia berada di rumahnya sendiri dan dia dibolehkan berkunjung. Kadang-kadang, saya diizinkan menghabiskan waktu bersamanya dalam tahanan rumah. Dan kami diizinkan mengirim paket perawatan dan surat serta berkomunikasi dengannya. Selama dua setengah tahun terakhir, kami tidak memiliki hak asasi manusia yang mendasar,” kata Aris.

Aris berharap masyarakat di seluruh dunia dapat bersatu dan membantu masyarakat di Myanmar, sehingga dapat mengakhiri pertumpahan darah. Dia menyoroti dunia internasional yang cenderung hanya fokus pada perang di Ukraina. Sementara masyarakat Myanmar juga membutuhkan bantuan yang mendesak.

“Jika hanya 2 persen dari apa yang telah diberikan kepada pasukan Ukraina diberikan kepada pasukan perlawanan di Burma, situasinya akan sangat berbeda sekarang,” kata Aris. ● gul



### PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMENANG KOMPETISI MELUKIS

Kedutaan Besar Tiongkok di Zimbabwe mengadakan upacara pemberian penghargaan kepada dua pemenang hadiah Kompetisi Melukis “Impianku” untuk pemuda Afrika, Rabu (13/9). Tampak dalam foto Dubes Tiongkok untuk Zimbabwe Zhou Ding (ke-4 dari kiri) dan pejabat Direktur Jenderal Badan Geospasial dan Antariksa Nasional Zimbabwe (ZINGSA) Painos Gweme (ke-5 dari kanan) foto bersama dengan peserta Kompetisi Lukisan “Impianku” dari Zimbabwe di Harare, Zimbabwe.

## PBB: 333 Juta Anak di Dunia Hidup dalam Kemiskinan Ekstrem

40 persen anak-anak di Afrika sub-Sahara masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

**JENEWA(IM)** - Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Bank Dunia, melaporkan pandemi Covid-19 telah menyebabkan perlambatan tajam dalam upaya mengakhiri kemiskinan anak, dengan 333 juta anak masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Dikutip dari Agence France-Presse (AFP), Rabu (13/9), laporan ini juga mengatakan pandemi menghambat upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem, dengan 30 juta anak lebih sedikit dibandingkan perkiraan sebelumnya. Akibatnya, sekitar satu dari enam anak masih hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dollar AS per hari.

“Krisis yang semakin parah, akibat dampak Covid-19, konflik, perubahan iklim, dan guncangan ekonomi, telah menghambat kemajuan, dan menyebabkan jutaan anak berada dalam kemiskinan ekstrem,” kata Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, dalam sebuah pernyataan.

Temuan-temuan dalam laporan ini menghambat pencapaian tujuan ambisius PBB untuk memberantas kemiskinan ekstrem anak pada tahun 2030.

“Dunia di mana 333 juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrem, tidak hanya kehilangan kebutuhan dasar, tetapi juga martabat, kesempatan atau harapan, tidak dapat ditoleransi,” kata Direktur

Global Kemiskinan dan Kestaraan Bank Dunia, Luis-Felipe Lopez-Calva, dalam sebuah pernyataan.

Tertinggi di Dunia Laporan tersebut menemukan sekitar 40 persen anak-anak di Afrika Sub-Sahara masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, persentase tertinggi di dunia.

Serangkaian faktor termasuk pertumbuhan populasi yang cepat, Covid-19, dan bencana terkait iklim telah memperburuk kemiskinan anak yang ekstrem di Afrika Sub-Sahara dalam beberapa tahun terakhir, meskipun wilayah lain di dunia terus mengalami penurunan.

Bank Dunia dan UNICEF meminta negara-negara untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan anak dan memberlakukan serangkaian tindakan termasuk perluasan program tunjangan anak universal.

Terkait masalah kemiski-

nan ekstrem ini, sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa diperkirakan lebih dari 340 juta perempuan dan anak perempuan, atau sekitar 8 persen dari populasi perempuan di dunia, hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030.

Laporan terbaru dari UN Women menunjukkan gambaran suram kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bawah Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sebuah agenda universal untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya pada 2030.

Meskipun ada upaya global, tetapi dunia masih gagal mencapai kesetaraan gender sehingga merugikan perempuan dan anak perempuan.

Untuk setiap satu dollar AS yang didapatkan pria dari pendapatan sebagai tenaga kerja secara global, perempuan hanya memperoleh

51 sen. Jika tren ini berlanjut, hampir satu dari empat perempuan akan mengalami kerawanan pangan sedang atau parah.

Dengan tingkat perkembangan saat ini, generasi perempuan berikutnya akan menghabiskan rata-rata 2,3 jam lebih banyak per hari untuk perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki.

Laporan itu juga memaparkan data perubahan iklim untuk pertama kalinya. Pada pertengahan abad ini, perubahan iklim dapat mendorong lebih dari 158,3 juta perempuan dan anak perempuan ke dalam kemiskinan, atau 16 juta lebih banyak dari jumlah total pria dan anak laki-laki.

Kerawanan pangan diperkirakan berdampak pada lebih dari 236 juta perempuan dan anak perempuan, dibandingkan dengan lebih dari 131 juta pria dan anak laki-laki, akibat perubahan iklim. ● tom

## DPR AS Buka Penyelidikan untuk Makzulkan Biden

**NEW YORK (IM)** - Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Amerika Serikat Kevin McCarthy membuka penyelidikan guna memakzulkan Presiden Joe Biden dari jabatan.

Penyelidikan yang dapat mengarah pada pemakzulan seorang presiden ini dilakukan DPR AS setelah McCarthy, politikus Partai Republik, mengklaim pihaknya telah menemukan bukti kuat mengenai dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Biden dan keluarganya selama menjabat di Gedung Putih.

“Saya mengarahkan komite DPR kami untuk membuka penyelidikan pemakzulan resmi terhadap Presiden Joe Biden,” kata McCarthy seperti dikutip AFP, Rabu (13/9).

“Ini adalah tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, upaya menghalangi hukum, dan korupsi,” papar McCarthy menambahkan.

Biden tersandung kasus terkait urusan bisnis putranya, Hunter, kala ia masih menjadi wakil presiden mendampingi Barack Obama. Namun, tak pernah ada bukti kredibel yang membuktikan presiden berusia 80 tahun itu terlibat dalam suatu kasus ilegal.

Sejak menguasai mayoritas kursi di Dewan Perwakilan AS, Partai Republik terus melancarkan penyelidikan terhadap keluarga Biden. Sejumlah pihak menilai Partai Republik sengaja menargetkan Hunter demi menjegal Biden di Gedung Putih dan rencana soal menggantung lagi di Pilpres 2024 mendatang.

Guna memuluskan hal

ini, partai Republik pun menekan McCarthy selama berbulan-bulan agar segera membuka penyelidikan pemakzulan.

McCarthy sendiri sejak awal menyatakan bahwa penyelidikan terkait pemakzulan Biden harus dimulai lewat pemungutan suara di DPR. Namun, karena tekanan ini, ia mau tak mau manut terhadap keinginan Partai Republik.

Juru bicara Gedung Putih, Ian Sams, pun menyalkan keputusan McCarthy. Sams lantas menuduh McCarthy merangkap “politik ekstrem yang paling buruk.”

“DPR telah menyelidiki Presiden [Biden] selama 9 bulan dan mereka tidak menemukan bukti kesalahan,” ujarnya di X (sebelumnya adalah Twitter).

Trump merupakan satu-satunya presiden AS yang menghadapi upaya dimakzulkan sampai dua kali oleh DPR. Pada 2019, DPR mendakwa Trump menyalahgunakan kekuasaan dan menghalang-halangi Kongres usai meminta Ukraina menyelidiki Biden dan putranya atas tuduhan korupsi.

Pada 2021, DPR kembali memakzulkan Trump atas tuduhan menghasut pemberontakan terkait serangan terhadap Gedung Capitol.

Namun, seluruh upaya pemakzulan Trump itu gagal di tingkat Senat, yang saat itu mayoritas Senator merupakan politikus Partai Republik. Trump pun mengaku tak bersalah dan menyebut upaya pemakzulan dirinya sebagai “perburuan penyihir” politik. ● tom

## Korban Tewas Banjir di Libya Bisa Mencapai 20 ribu Orang

**DERNA(IM)** - Korban jiwa akibat banjir bandang yang menerjang Kota Derna, Libya diperkirakan bisa mencapai 20.000 jiwa. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Derna Abdulmenam Al-Ghaithi.

Kota Derna disapu banjir bandang pada Minggu (10/9) malam waktu setempat. Badai kuat membuat bendungan di Derna jebol dan menyapu bangunan di pinggir sungai, menghanyutkan isinya hingga Laut Mediterania.

Per Rabu (13/9) kemarin, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Libya, Letnan Tarek Al-Kharraz

menyebut terdapat 3.840 korban jiwa yang tercatat sejauh ini. Sedangkan Menteri Penerbangan Sipil Hichem Abu Chkiout melaporkan terdapat lebih dari 5.300 korban tewas.

Akan tetapi, Wali Kota Derna Abdulmenam Al-Ghaithi memperkirakan korban jiwa akibat banjir bandang bisa mencapai 18.000 hingga 20.000 tewas. Hal tersebut didasarkan pada jumlah distrik yang dihancurkan banjir bandang.

Mabrooka Elsemesmary, jurnalis yang sempat meliput di Derna menyebut kota itu mengalami “bencana berskala masif.” Keluarga-keluarga yang sedang tidur dalam apartemen dilaporkan hanyut ketika banjir bandang menerjang.

“Tidak ada air, listrik, dan bensin. Ada gelombang pendudukan yang mencoba pergi dari Derna, tetapi banyak di antaranya terjebak karena banyak jalan tertutup atau hilang,” kata Elmesmary dikutip Al Jazeera.

Pemerintah Libya sendiri menyebut angka resmi orang hilang akibat banjir Derna mencapai 10.000. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan korban banjir yang masih hilang sedikitnya 5.000 orang. ● ans



### SENIMAN KUNQU OPERA MENGGELAR FLASH MOB DI PARIS

Aktor Kunqu Opera Shi Xiaming (kiri) dan aktris Kong Aiping menampilkan pertunjukan flash mob di dekat Museum Louvre di Paris, Prancis, Rabu (13/9). Seniman dari Provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, menampilkan pesona Kunqu Opera melalui serangkaian flash mob pertunjukan di dekat landmark ikonik di Paris.

## Pakar Hak Asasi PBB Desak AS Tambah Sanksi ke Junta Militer Myanmar

**WASHINGTON(IM)** - Pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Myanmar mendorong Amerika Serikat (AS) memperkerat sanksinya pada penguasa militer negara itu. Termasuk sumber utama pendapatan mereka yakni perusahaan gas dan minyak negara.

Pelapor Khusus PBB Tom Andrews yang juga mantan anggota Kongres AS mengatakan penting bagi Washington untuk setidaknya mempertahankan bantuan kemanusiaan pada korban junta baik di dalam dan luar Myanmar.

Di sidang Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos di Kongres AS, Andrew mengatakan ia “terkejut” dengan laporan beberapa donor, termasuk AS, mungkin mengurangi dukungan bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Ia menambahkan Rencana Respons Bersama yang mencakup jatah makanan untuk anak-anak Rohingya di Bangladesh hanya 32 persen yang didanai pada tahun ini.

Andrews memuji Washington karena menjatuhkan sanksi terhadap Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar pada bulan Juni.

Namun menurutnya masih banyak yang perlu dilakukan.

“Kita perlu menerapkan lebih banyak sanksi, saya mendesak AS untuk bergabung dengan Uni Eropa dan segera menjatuhkan sanksi terhadap satu-satunya sumber pendapatan terbesar, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar,” kata Andrews, Rabu (13/9).

“Jika Anda dapat menghentikan pendanaan, Anda dapat memotong kemampuan mereka untuk melanjutkan kekejaman ini,” katanya mengacu pada kematian warga sipil di tangan militer.

Andrews juga mendesak Washington untuk bekerja sama dengan negara lain memblokir akses junta terhadap senjata. Bulan lalu, Washington memperluas sanksinya terhadap Myanmar dengan memasukkan perusahaan atau individu asing yang membantu junta mendapatkan bahan bakar jet yang digunakan untuk melancarkan serangan udara.

AS juga memperkirakan militer Myanmar telah membunuh lebih dari 3.900 warga sipil sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tahun 2021.

Pada bulan Januari, AS menjatuhkan sanksi pada direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar.

Namun belum mengambil tindakan lebih jauh terhadap perusahaan tersebut, meskipun ada desakan dari kelompok hak asasi manusia dan gerakan perlawanan di Myanmar.

Para pejabat militer Myanmar meremehkan dampak sanksi dan mengatakan serangan udara mereka menasar pemberontak. Dalam laporannya bulan Mei lalu Andrews mengatakan sejak kudeta militer Myanmar mengimpor setidaknya 1 miliar dollar AS senjata dan bahan lainnya.

Ia juga menuduh Rusia dan Tiongkok membantu kampanye militer Myanmar untuk menghancurkan oposisinya. ● ans